

Otorita Pastikan Anggaran IKN Tidak Dipangkas



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 05/02/2025

JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dipangkas. Hal ini disampaikan Basuki menyusul adanya pemangkasan anggaran OIKN tahun 2025 seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025.

Dia bilang, rapat terakhir soal pembangunan IKN di Istana Kepresidenan pun dilakukan setelah Inpres dibuat. “Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau (Presiden Prabowo Subianto), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan,” kata Basuki dilansir dari Kompas.com, Selasa (4/2).

“Nanti kalau saya salah disampaikan, karena Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang minggu 21 Januari,” imbuhnya. Terkait hal ini, pihaknya akan bersurat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menuturkan, anggaran OIKN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp6,39 triliun. OIKN pun akan mendapatkan tambahan anggaran untuk pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif di IKN sebesar Rp8,1 triliun. “Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirin surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” beber Basuki.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, pemerintah bakal mulai membangun kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

Sebab pembangunan dua istana, Istana Garuda dan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), rampung. Secara garis besar, pembangunan IKN memasuki tahap kedua usai membangun KIPP di tahap pertama. “Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah, sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif dan juga yudikatif. Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu,” kata AHY di kesempatan yang sama. AHY menuturkan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp48,8 triliun pada tahun 2025-2029 untuk pembangunan IKN. **(kcm/sh/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Otorita Pastikan Anggaran IKN Tidak Dipangkas, 05/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU 3/2022), Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
2. Diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 24A ayat (2) UU 3/2022 diatur bahwa pendapatan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Ibu Kota Nusantara yang meliputi:
 1. pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara;
 2. retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara; dan
 3. pendapatan asli Ibu Kota Nusantara lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pendapatan transfer ke Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. pendapatan lain Ibu Kota Nusantara yang sah.